

KIAI BISRI SYANSURI
Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh 1971-1980

Tesis ini Diajukan Kepada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Islam (MSI)



Oleh:

Joko Wahyono
NIM: 1120310038

KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Wahyono, S.H.I
NIM : 1120310038
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



Joko Wahyono, S.H.I

NIM. 1120310038

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

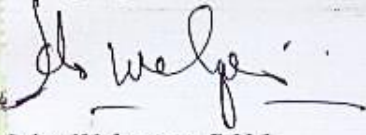
Nama : Joko Wahyono, S.H.I
NIM : 1120310038
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2015

Saya yang menyatakan,




Joko Wahyono, S.H.I
NIM. 1120310038



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KH BISRI SYANSURI: Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh
Nama : Joko Wahyono
NIM : 1120310038
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 30 Desember 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 11 Januari 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

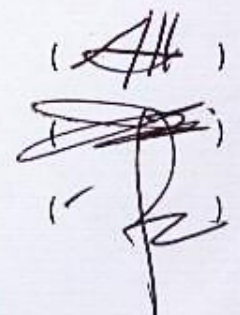
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KH BISRI SYANSURI: Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh
Nama : Joko Wahyono
NIM : 1120310038
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Dr. Ibnu Burdah, M.A.
Pembimbing/Penguji : Dr. A. Yani Anshori, M.A.
Penguji : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.



(~~Signature~~)
(~~Signature~~)
(~~Signature~~)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2015

Waktu : 08.00-09.00
Hasil/Nilai : A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan /Sangat Memuaskan /Cum Laude*~~

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KH BISRI SYANSURI
Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh 1971-1980

Yang ditulis oleh:

Nama	: Joko Wahyono, S.H.I
NIM	: 1120310038
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat ditujukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk untuk diakukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Desember 2015
Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, MA

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama”
(HR. Ahmad, Thabrani dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada almamater Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kedua orang tua, keluarga, kerabat dan para sahabat penulis.

ABSTRAK

Masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, pasca dilantik oleh MPR pada 1968, merupakan awal dari gerak baru sejarah bangsa Indonesia dan juga sejarah baru bagi organisasi sosial keagamaan di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Di masa ini sampai akhir tahun 1980-an, politik NU lebih banyak berada di luar kekuasaan (oposisi). Fusi partai dan agenda pemurnian pengamalan Pancasila yang digadang rezim Orde Baru mengharuskan segala lembaga atau organisasi yang ada menerima dan menerapkan asas tunggal Pancasila.

Sebagai oposisi, NU yang kala itu dipimpin Kiai Bisri Syansuri selalu dicurigai. Pendirian prinsipil sang *Rais 'Aam* sebagai ulama fiqh sering kali membuat NU harus berbenturan dengan sejumlah kebijakan pemerintah. Penelitian ini mengkaji pemikiran fiqh Kiai Bisri ketika beroposisi dengan penguasa Orde Baru. Melalui ijtihad politik Kiai Bisri, penulis mereposisi fiqh siyasah yang selama ini dianggap sebagai legitimasi atas kebijakan penguasa, bukan paradigma yang memiliki aturan main. Ada beberapa *political event* yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, di antaranya; fusi partai, pengesahan RUU Perkawinan dan indoktrinasi Pancasila.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Sebagai *tool of analysis*, penulis menggunakan teori diskursus. Karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya menempatkan pemikiran Kiai Bisri sebagai pemikiran individual (fikir rajulin), tapi sebagai suatu fenomena pemikiran (zahirah fikriyyah). Artinya, sejarah pemikiran dalam penelitian ini bukan semata diartikan sebagai sejarah ide atau tentang historisitas sebuah ide yang kronologis, tetapi juga sebagai bangunan epistemologi dari keseluruhan dinamika pemikiran NU.

Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa fiqh Kiai Bisri bukanlah fiqh siyasah yang dimainkan secara instrumental, tapi diorientasikan secara praksis dan melebur dalam praktik berpolitik. Bukan pula fiqh sebagai legitimasi praktik politik penguasa Orde Baru, melainkan sebagai strategi dalam berpolitik. Terbukti, dari fatwa-fatwa, sikap maupun keputusan politik yang lahir dari Kiai Bisri, di mana fiqh menjadi *counter discourse*, atau bahkan *resistance discourse* terhadap kooptasi dan depolitisasi politik Islam yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru.

Wacana “tandingan atau perlawanan” itu diorientasikan untuk kemaslahatan umum (masalah *'ammah*) dalam kerangka menjaga keseimbangan kekuasaan Orde Baru dan melakukan mekanisme kontrol yang efektif dan konsisten dalam menjalankan pemerintahan. Maka, fiqh siyasah Kiai Bisri tidak terbatas pada teks. Ada interaksi yang intens antara logika teks dengan logika konteks, sehingga mendinamisasikan fiqh siyasah NU dalam berpolitik, berhadapan dengan kekuatan rezim Orde Baru.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	Es (titik di bawah)
ض	dad	d	De (titik di bawah)
ط	ta	t	Te (titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	' _	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya'	ai	a dan i
ُ...و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ..	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'. Marb tah

1. Ta' marbūtah hidup.

Ta' marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudatul atfāl

2. Ta' marbūtah mati.

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabb al-'alamīn, syukur kepada Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada semua makhluk-Nya. Berkat petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Kalimat salawat dan salam sepantasnya tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang melanjutkan perjuangannya.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah membantu, khususnya dalam memberikan bimbingan, do'a dan motivasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Machasin, MA. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah, BSW., MA., Ph.D. selaku koordinator Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, MA. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasinya, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam yang telah memberikan berbagai macam ilmu dan wawasannya selama penulis belajar di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu kelancaran administrasi-akademik selama penulis belajar di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, sekaligus bapak dan ibu mertua penulis yang selama ini telah memberikan banyak kesempatan, motivasi dan doa tiada henti agar penulis menyelesaikan studi.
8. Keluarga kecil penulis, khususnya istri (Niken Ulfah Rahmaniingrum, S.Pd.SI) dan anak tercinta (Nizar Fariz AS), atas kesabaran, motivasi dan doa-doanya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam angkatan 2011 dan seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Jazākumullāh khair al-jaza', penulis tidak dapat membalas kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan. Akhir kata, karya tulis yang sederhana ini semoga dapat bermanfaat bagi perbendaharaan kajian, khususnya dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan dalam Islam.

Yogyakarta, 25 Desember 2015
Penyusun

Joko Wahyono, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II KONSTRUKSI PEMIKIRAN FIQH SIYASAH NU

A. Ideologi, Tradisi dan Basis Kosmologi Politik NU.....	23
B. Fiqh Siyasa: Model Pendekatan Baru dalam Politik Islam	27
C. Fiqh Sebagai Pemaknaan Realitas Sosial-Politik.....	31
D. Karakteristik Ijtihad Politik NU	34
E. Revitalisasi Peran Politik Kiai NU.....	40

BAB III KH BISRI SYANSURI: SANTRI, KIAI DAN POLITISI

A. Lahir dari Tradisi Keagamaan yang Kuat	45
B. Masa Belajar: Konsisten Menekuni Ilmu Fiqh	47
C. Pesantren Sebagai Pusat Kesetaraan Sosial	52
D. Menjadi Aktivistis NU: Pilihan yang Rasional.....	56
E. Politik Sebagai Alat Perjuangan	60

BAB IV IJTIHAD POLITIK DAN TEKANAN REZIM ORDE BARU

(1970-1980)

A. Orde Baru dan Politik Islam: Hubungan Penuh Kecurigaan	68
B. Oposisi dan Fatwa Politik Perlawanan.....	73
C. UU Perkawinan: Dari Radikal Ke Kompromi	83
D. Indoktrinasi Pancasila: Dari Oposisi ke Penarikan Diri.....	92
E. Simbol Ka'bah: Penguatan atau Pengkerdilan	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran dan Rekomendasi	104

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE.....	111
------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, setelah dilantik oleh MPR pada 1968, merupakan awal dari gerak baru sejarah bangsa Indonesia dan juga sejarah baru bagi organisasi sosial keagamaan di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU). Fusi partai politik dan agenda pemurnian pengamalan Pancasila yang digadang rezim Orde Baru mengharuskan segala lembaga atau organisasi yang ada menerima dan menerapkan asas tunggal Pancasila.¹

Dua agenda besar di masa awal pemerintahan Orde baru itu, menurut sebagian pengamat dimaknai sebagai strategi politik Soeharto untuk tidak menghidupkan kembali ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat sesuai dengan ideologi partai politik yang ada.² Di sisi yang lain, kesadaran berpolitik NU, khususnya setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri, telah menempatkan tokoh-tokohnya, seperti KH. Wahab Hasbullah (Kiai Wahab) dan KH. Bisri Syansuri (Kiai Bisri) dalam posisi penting di mata penguasa.

Di awal kemerdekaan hingga akhir dekade 1950-an, para tokoh NU terlibat pertarungan ideologi yang cenderung konfrontatif dengan penguasa. Kemudian berlanjut dalam perundingan Badan Konstituante tahun 1955-

¹ As'ad Said Ali, *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati* (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 73.

² Priyo B. Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 101.

1959. Meskipun agak berbeda dengan periode sebelumnya, dinamika politik yang terjadi memberi gambaran tentang perdebatan ideologi berbasis agama dengan ideologi Pancasila.³

Relasi agama dan negara terekam dalam perdebatan di dalamnya. Gambaran itu bukan hanya karena mayoritas peserta perundingan orang Islam (kiai), tetapi juga karena Islam itu sendiri yang diajukan sebagai alternatif pembentukan dasar konstitusi negara.⁴ Argumen-argumen yang dikemukakan dalam perdebatan itu banyak menyitir ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi mengenai relasi agama dan negara.⁵ Artinya, kenyataan sejarah itu merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai agama dalam berpolitik praktis.

Akan tetapi, karena ada intervensi pemerintah, dalam hal ini Soekarno melalui Demokrasi Terpimpinnya, hasil rumusan anggota Majelis Konstituante yang dipilih saat Pemilu 1955 itu ternyata gagal diimplementasikan. Padahal, sidang Majelis Konstituante sudah menyelesaikan 90 persen dari keseluruhan pembahasan.⁶ Kenyataan inilah yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran atas demokrasi.⁷ Selain itu, campur

³ Uraian lengkapnya lihat Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁴ Saifuddin Zuhri, *Unsur Politik dalam Dakwah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), hlm. 56.

⁵ Sebagai contoh, KH. Asnawi Hadisiswojo (Masyumi) mengutip QS. Al-Hijr: 99; Anwar Amiruddin (PPTI) mengutip hadis "*al-'Ajalatu min al-shaytan wa al-Ta'anni al-Rahman*," dan bahkan KH. Dasuki Siradj dari Fraksi PKI mengutip QS. Al-Hajj: 39-40. Konstituante Republik Indonesia, *Risalah Perundingan Tahun 1957, Djilid VI, Sidang III Rapat ke-65 sampai ke-71* (Bandung: Masa Baru, 1957), hlm. 168, 216 dan 471.

⁶ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 42.

⁷ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas nasional 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti, 1987), hlm. 432.

tangan pemerintah tersebut juga berimplikasi negatif bagi kelompok Islam, kecuali NU (juga PSII, Parmusi dan Perti).⁸

Pengecualian itu dikarenakan NU segera menata kembali orientasi politiknya dan menerima Manipol Usdek.⁹ Alasan inilah yang membuat NU dikenal sebagai partai pragmatis-oportunis, lebih mementingkan keselamatan posisi politik dari pada ideologi yang diperjuangkan. Menurut Deliar Noer, sikap ini menandakan terpisahnya sikap politik NU dengan ideologinya.¹⁰ Artinya, pragmatisme politik adalah pengingkaran terhadap ideologi. Greg Fealy belum melihat relasi yang jelas antara fiqh siyasah sebagai paradigma berpolitik dengan perilaku politik.¹¹

Bahkan, ia menyimpulkan bahwa paradigma seperti itu tidak akan ada gunanya. Dalam sejumlah analisisnya, fiqh yang dimaksud Fealy adalah kaidah fiqhiyah yang ditempatkan sebagai legitimasi atas sikap dan perilaku politik, bukan paradigma yang memiliki aturan main.¹² Mengkaji hubungan antara agama dengan perilaku politik ini, setidaknya melahirkan dua pandangan.¹³ *Pertama*, agama sebagai nilai memiliki pengaruh yang menentukan terhadap perilaku politik komunitas tertentu. *Kedua*, perilaku

⁸ A. Syafi'i Ma'arif menyebut ketiga partai ini sebagai sayap pesantren yang menyesuaikan diri dengan perkembangan politik. Strategi dasarnya adalah menyenangkan sesepuh (patron) dan menjaga agar patron itu bersedia melindungi mereka secara politik. A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 187.

⁹ Manipol (Manifesto Politik) Usdek adalah sebutan untuk konsepsi presiden yang berisikan undang-undang dasar, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.

¹⁰ Deliar Noer, *Partai Islam*, hlm. 395-396.

¹¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm.90.

¹² *Ibid.*, hlm. 91.

¹³ J.L. Hammond, *The Politics of Benevolence: Revival Religion and American Voting Behaviour* (Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1979), hlm. 20.

politik komunitas mana pun, tidak didorong oleh sebuah keyakinan agama. Hubungan apa pun di antara keduanya dinilai palsu.¹⁴

Dari kedua pandangan itu, para sarjana lebih memegang pendapat yang pertama bahwa ketaatan dan afiliasi keagamaan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Relasi itu tampak sejalan dengan tesis Max Weber yang melihat nilai-nilai agama memberi pengaruh terhadap perilaku ekonomi.¹⁵ Maka, tidak heran jika kemudian muncul politik aliran, seperti yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz – kendati untuk konteks politik dewasa ini teori itu banyak dikritik.¹⁶

Misalnya, pada Pemilu 1999 muncul analisis bahwa PBB adalah partai jelmaan Masyumi, PKB dan PKU berafiliasi dengan NU, PAN memiliki relasi dengan Muhammadiyah, PDI-P mewadahi aspirasi politik kaum abangan (*wong cilik*) dan Golkar memiliki basis kaum abangan-priyayi. Pada Pemilu 2004 dan 2009, kemunculan PK (sekarang PKS) dinilai mewakili kalangan Muslim modernis-puritan, sementara Partai Demokrat lebih menggabungkan corak rasional-birokratis model Golkar dan sekuler-populis *ala* PDI-P.

¹⁴ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 159.

¹⁵ Dalam karya monumentalnya, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Weber berusaha menjelaskan mengapa kapitalisme modern berkembang di Eropa Barat dan Amerika, tetapi tidak berkembang di wilayah lain. Ia kemudian menemukan bahwa suatu kegiatan unik yang bersifat keagamaan, yaitu reformasi Protestan (*Calvinisme*) telah memberikan pengesahan kepada usaha-usaha yang bercorak ekonomi. Ajat Sudrajat, *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1-11.

¹⁶ Politik aliran mendasarkan pada persamaan ideologi partai dengan ideologi konstituen, dengan pengklasifikasian tiga konsep, yakni Priyayi, Abangan, dan Santri yang menentukan afiliasi politik. Tetapi, menurut Bahtiar Effendi politik aliran memiliki kecenderungan pengidentifikasian politik Islam dengan partai Islam. Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 23-58.

Syafi'i Ma'arif melihat bahwa pengalaman sejarah otoritarianisme selama 32 tahun di rezim Orde Baru tidak serta merta mengubur potensi partai politik "beraliran" yang tampil dalam Pemilu 1955, 1971 dan 1977.¹⁷ Berbeda dengan Ricklefs bahwa politik aliran, loyalitas tradisional dan pengaruh tokoh-tokoh keagamaan yang pernah muncul di era Soekarno dalam beberapa dekade terakhir sudah mulai melemah.¹⁸ Situasi ini tak bisa dilepaskan dari konstelasi politik pasca Reformasi, di mana kran kebebasan berpolitik menjadi terbuka lebar. Konsekuensinya, pada Pemilu 1999 (pemilu langsung setelah Orde Baru) dibanjiri oleh partai-partai baru.

Banyaknya partai-partai baru pada pemilu 1999 ini mengindikasikan bahwa sistem kepartaian di Indonesia pasca Reformasi mengalami apa yang disebut Geovani Sartori sebagai pluralisme ekstrem,¹⁹ sulit membentuk *trade mark* partai secara tersendiri. Tak ada jarak ideologis antara satu partai dengan partai lainnya. Atau terjadi demarkasi, sehingga ideologi masing-masing partai menjadi kabur dan semua partai cenderung sangat pragmatis.²⁰

Pragmatisme perilaku politik cukup menarik ketika dikaitkan dengan perjuangan politik (aliran) partai Islam atau berbasis Islam (NU) di masa Orde Baru. Di masa awal Orde Baru sampai akhir tahun 1980-an gerak politik

¹⁷ A. Syafi'i Ma'arif, "Aliran Politik di Tubuh Orde Baru," dalam *Gerbang*, edisi pertama, Th. I (Desember 1998- Februari 1999), hlm. 23-29.

¹⁸ Banyak yang menilai Pemilu 1999 adalah kemenangan politik Islam Abangan (PDIP dan Golkar), tapi menurut Ricklefs justru politik aliran mengalami kegagalan, karena kurang berperan dalam kehidupan keagamaan, politik, ekonomi dan sosial, khususnya di masyarakat Jawa. Merle C. Ricklefs, *Religious Reform and Polarization in Java*, (Leiden: ISIM, 2008), hlm. 34-35.

¹⁹ Dikutip dari Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem kepartaian di Indonesia era Reformasi*. (Jakarta: KPG, 2009), hlm. 8.

²⁰ Benny Innayatullah, *Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan* (Jakarta: Laporan Tahunan The Indonesia Institute, 2008), hlm. 78.

NU lebih banyak berada di luar kekuasaan (oposisi).²¹ Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sikap politik oposisi NU terhadap pemerintah Orde Baru (1971-1980). Sikap politik oposisi NU ini terlihat dari pendirian prinsipil dari Kiai Bisri Syansuri (1887-1980).

Dengan sikap dan pendiriannya yang prinsipil itu, beberapa kali NU harus berbenturan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Orde Baru. Kiai Bisri adalah seorang ulama ahli fiqh dan seorang guru, tetapi semakin lama semakin terlibat dalam politik. Ketika Masyumi dibentuk pada 1943, Kiai Bisri aktif di tingkat lokal dan pada 1945 menjadi salah seorang wakil NU di dalam Komite Nasional Pusat (KNIP).

Pasca pemilu 1955 dia menjadi anggota Majelis Konstituante sampai badan ini dibubarkan, dan sejak 1971 hingga akhir hayatnya menjadi anggota DPR – mewakili NU dan sejak 1973 mewakili PPP. Setelah Kiai Wahab Hasbullah meninggal dunia pada bulan Desember 1971, Kiai Bisri (yang waktu itu jadi wakilnya) mengantikannya sebagai Rais ‘Aam. Ketika NU bergabung ke PPP, Kiai Bisri juga menjadi Ketua Dewan Majelis Syuro. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyebut Kiai Bisri sebagai “*kiai plus*”.²² Dalam diri Kiai Bisri melekat tiga karakter, yakni sebagai perintis kesetaraan gender, ahli dan pecinta fiqh dan sekaligus seorang politisi.

²¹ Seorang ahli Indonesia dari Barat, Ruth T. McVey pernah menulis sebuah artikel yang berjudul Faith as the Outsider: Islam in Indonesian Politics. Artikel ini diterbitkan dalam sebuah buku James P. Piscatori (ed.), *Islam in the Political Process*, (New York: Cambridge University Press, 1983), hlm. 31.

²² Abdurrahman Wahid, *KH. Bisri Syansuri, Pecinta Hukum Fiqh Sepanjang Hayat*, Majalah Amanah, Tahun 1989.

Dalam sejarah karir politiknya selama masa Orde Baru, ada beberapa *political event* yang di dalamnya Kiai Bisri terlibat secara langsung. Misalnya, ketika rezim Orde Baru memberlakukan fusi partai politik, perdebatan RUU Perkawinan, penolakannya terhadap indoktrinasi Pancasila melalui pendidikan Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan lain sebagainya. Sejumlah keputusan dan sikap politik Kiai Bisri dalam kerangka keilmuan fiqh sebagai paradigma berpolitik inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana ilmu fiqh Kiai Bisri Syansuri diimplementasi dalam berpolitik di masa Orde Baru tahun 1971-1980?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ilmu fiqh Kiai Bisri Syansuri diimplementasi dalam berpolitik di masa Orde Baru tahun 1971-1980

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademis terkait dengan formulasi hubungan antara fiqh dan politik bernegara dalam perpektif kiai.
2. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para politisi dewasa ini dalam berpolitik atau mengelola partai politik untuk tetap berpijak pada nilai dan ajaran agama.

3. Diharapkan dapat menjadi salah satu khazanah penting bagi masyarakat pesantren untuk terus menggali keilmuan pesantren yang bisa menjawab berbagai problem politik berbangsa dan bernegara.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang relasi kiai dengan politik (negara) bukan sama sekali baru. Endang Turmudi dalam *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* menjelaskan perjuangan umat Islam melawan Belanda yang tidak dilanjutkan dengan penerapan politik Islam selama kemerdekaan Indonesia.²³

Selain itu, pergeseran peran kiai dengan masuk ke dalam politik dan kekuasaan telah mengaburkan peranannya sebagai tokoh yang independen. Kendati demikian, ia memberikan semacam “*both side*” bahwa pembentukan partai politik Islam adalah mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik umat, sehingga pada perkembangannya ada signifikansi perubahan posisi politik kiai dengan munculnya perubahan dalam etos umat Islam Indonesia.²⁴

Achmad Patoni dalam *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* lebih membidik tentang orientasi kiai dalam hubungannya dengan partai politik dari beberapa prespektif sosial. Menurutnya, tujuan kiai terjun dalam partai politik semata untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun,

²³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

aktivitas politik praktis membuat kiai lebih banyak “meninggalkan” pesantren. Di sisi lain, kegiatan berpolitik membawa dampak, khususnya yang bersifat material bagi pengembangan pesantren.²⁵

Khoiro Ummatin dalam *Perilaku Politik Kiai* menjelaskan pola relasi antara kiai pesantren, organisasi NU, dan partai politik yang tidak hanya di masa reformasi saja, tetap juga jauh sebelum adanya keputusan kembali ke *khittah* tahun 1984.²⁶ Dalam hubungannya dengan politik, kiai adalah sosok yang memiliki kharisma dan pengaruh yang tinggi, sehingga banyak partai politik yang melamar para kiai sebagai mesin pendulang suara (*vote getter*).

Sementara, Asep Saeful Muhtadi dalam *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* membuat hipotesis bahwa adanya pergeseran orientasi politik kiai NU ketika “kulturalisasi” itu sudah mengakar dan menjadi arus utama dalam politik NU.²⁷ Selanjutnya, M. Ali Haidar dalam *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik* membahas tentang relasi politik NU dengan argumen fiqhnya. Ia membedakan secara tajam antara fiqh *qawli* dan *manhaji*, seperti dalam kasus pemecatan Subhan ZE oleh Kiai Bisri Syansuri, dipahami karena Kiai Bisri tidak seperti Kiai Wahab yang lebih *manhaji*, dan lebih mengutamakan kaidah fiqh dari pada fiqh *qawli*.²⁸

²⁵ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 172.

²⁶ Khoiru Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 2-6.

²⁷ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 281.

²⁸ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 222.

Hampir sama dengan M. Ali Haidar, Ridwan dalam *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* melihat bahwa politik para kiai mengedepankan fiqh syiasah yang *manhaji* dengan melepaskan pola pikir fiqh klasik untuk kemudian ditempatkan sebagai pemikiran politik yang aplikasinya menjadi disiplin ilmu yang independen dan empiris.²⁹

Terakhir, KH Ahmad Athoillah, dkk., dalam *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih Lentur Bersikap* mengungkap biografi Kiai Bisri Syansuri sebagai salah satu kiai pendiri NU sekaligus pejuang kemerdekaan dalam alur sejarah yang sistematis. Tetapi, karya ini lebih menyajikan romantisme sejarah panjang tentang jasa-jasa besar Kiai Bisri dalam berdakwah, membangun pesantren, dan kiprahnya dalam berjuang melawan penjajah melalui barisan Hizbullah dan Sabilillah.³⁰

Dari beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan sebuah karya yang secara spesifik menganalisis pemikiran dan kepemimpinan politik KH Bisri Syansuri sebagai gugus pemikiran politik NU secara fiqhiyah. Beberapa peneliti justru tampak terjebak pada perbedaan secara dikotomis antara pendekatan fiqh *qawli* dan *manhaji*, yang menurut penulis di antara keduanya merupakan satu kesatuan. Sebab, sesuai dengan falsafah NU, pendekatan *qawli* masih kerap dipakai kiai sebagai alat untuk mempertahankan tradisi dari macam pembaruan yang bisa menggerus jati diri NU.

²⁹ Ridwan, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 274.

³⁰ KH Ahmad Athoillah, dkk., *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih Lentur Bersikap* (Surabaya: Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar & Pustaka Idea Surabaya, 2015), hlm. 45.

Sementara, dalam konteks tertentu, ketika pembaruan dibutuhkan namun terbentur oleh nilai-nilai tradisional, di situlah dibutuhkan pendekatan *manhaji*. Ringkasnya, perpaduan antara *fiqh qawli* dan *manhaji* mencerminkan pandangan kiai NU tentang *al-muḥafāzah ala al-qadīm al-ṣālih wa al-akhḍu bi al-jadīd al-aṣlah*.³¹

E. Kerangka Teori

Meskipun sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, dalam konteks akademik, istilah "*kiai*" untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Geertz pada tahun 1960 dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ulama dan kiai.³² Sementara, Hiroko Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan antara istilah "*kiai*" dari "*ulama*," karena fungsi formal yang diperankannya. Baginya, ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan kiai cenderung bermain pada tataran kultural.³³

Dengan menggunakan argumentasi ini, dapat dipahami mengapa perkumpulan formal komunitas pemilik ilmu agama Islam di Indonesia menggunakan istilah "*ulama*", yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan

³¹ KH. Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah*, cet. IV (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 67. Lihat juga Ahmad Baso, *NU Studies, Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 41.

³² Lengkapnya lihat Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981). Di Indonesia sebenarnya ada beberapa istilah atau gelar yang seakar dengan makna kiai, seperti di daerah Jawa Barat (Sunda) biasa disebut "*Ajengan*", di Sumatra Barat disebut "*Buya*", di daerah Aceh dikenal dengan "*Teungku*", di Sulawesi Selatan dipanggil dengan "*Tofanrita*", di Madura disebut dengan "*Nun*" atau "*Bendara*" disingkat "*Ra*", dan di Lombok atau seputar daerah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masyarakat memanggilnya dengan sebutan "*Tuan Guru*". Hartono Ahmad Jaiz, *Bila Kiai Dipertuhankan : Membedah Sikap Keberagamaan NU*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 29-30

³³ Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 4.

Majelis Kiai Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis lebih memilih menggunakan istilah "kiai", bukan "ulama", karena analisisnya yang lebih ditekankan pada aspek kultural dari kehidupan figur sosial-politik yang disebut kiai. Lebih-lebih untuk melihat pemikiran dan fungsi kepemimpinan sosial politik yang diperankannya.

Zamakhsyari Dhofier memandang kiai sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam bidang agama Islam yang mengajarkan beberapa kitab kuning atau kitab klasik kepada para santrinya dan memimpin sebuah pondok pesantren.³⁴ Namun, menurut Geertz tidak setiap guru yang mengajarkan agama di pesantren disebut kiai. Banyak syarat yang harus ditambahkan pada seorang guru di pesantren untuk disebut kiai, antara lain dari segi intelektualitas, kualitas kepribadian, dan kepemimpinannya.³⁵

Sejarah mencatat bahwa intelektualitas – apalagi ditopang oleh kualitas kepribadian dan kepemimpinan – menjadi jaminan atas kemampuan seseorang dalam menganalisis problem-problem secara mendalam, sehingga melahirkan pemikiran yang radikal, filosofis, tidak tendensius, bebas kepentingan, selain memuat kebenaran. Tentu untuk melahirkan proses yang demikian dibutuhkan obyektivitas yang konsisten. Karena obyektivitas inilah intelektual memegang kendali terhadap perubahan sosial dan peradaban.³⁶

³⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 55

³⁵ Clifford Geertz dalam M. Dawan Raharjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa : Risalah Cendhiawan Muslim*, (Bandung : Mizan, 1993), hlm 171.

³⁶ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 44.

Apa yang dimaksud pemikiran politik (*political thought*) di kalangan ilmuwan politik sendiri masih diperdebatkan. Munawar Ahmad, dengan merujuk pandangan Berki (1977), menjelaskan sejauh ia berbicara tentang relasi kuasa antara sipil-negara, dikategorikan sebagai pemikiran politik. Pijakan untuk membaca pemikiran politik adalah teks dan perkataan (*talk*), karena keduanya mengandung interest pada suatu komunitas atau bangsa. Teks atau perkataan sendiri merupakan entitas yang terlihat sebagai perwujudan bahasa.³⁷

Sementara, bahasa membutuhkan media artikulasi yang disebut *visible mark* (tanda yang terlihat), yang kemudian diberi nama teks. Tentu saja teks ini tidak berdiri sendiri, tapi ada serangkaian proposisi yang memberi bentuk dan makna terhadap teks tersebut. Dengan demikian, teks memiliki bangunan dan kontruksi. Pengertian ini menjadi pengikat hubungan teks dengan konteks tatanan sosial. Jadi, makna atau arti menjadi indikator adanya intimidasi sosial terhadap teks itu sendiri, karena itu teks disebut wacana atau diskursus.

Wacana bagi Teun A. Van Dijk bukan datang tiba-tiba dari sebuah ruang sosial yang kosong. Tetapi dipengaruhi oleh kognisi sosial. Bagi Van Dijk, penelitian tentang wacana tidak hanya sebatas teks semata, tetapi juga harus dilihat bagaimana suatu teks itu diproduksi, sehingga bisa diketahui mengapa teks bisa muncul.³⁸ Selain itu, wacana memiliki tiga dimensi: teks, kognisi sosial dan konteks sosial.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁸ Dikutip dari Munawar Ahmad, *Merunut Akar Pemikiran Politik Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Analysis Sebagai Alternatif Metodologi*, (Yogtakarta: Gava Media, 2007), hlm. 79.

Dalam analisis wacana (*discourse analysis*) Van Dijk ini yang pertama diteliti adalah struktur teks, yakni menganalisa strategi wacana yang di pakai untuk menggambarkan seseorang, peristiwa serta membangun wacana dalam sebuah strategi tekstual untuk menyingkirkan sebuah kelompok, gagasan atau peristiwa tertentu.³⁹ Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) ini mengungkap maksud tersembunyi dari subjek yang berupa pernyataan. Bahasa sebagai alat tidak hanya dipandang sebagai linguistik tradisional, melainkan sebagai alat yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik ideologi dan memandang bahasa sebagai praktik sosial-politik.

Ihwal peristiwa politik (*political event*), Key dan Agraza membaginya menjadi dua: langsung (*directly*) dan tidak langsung (*indirectly*). Terjadinya peristiwa politik langsung karena ada *effect of political behavior*, rangsangan langsung dari perilaku politik yang terjadi menjelang dan selama pemikiran politik itu lahir. Sedangkan peristiwa politik tidak langsung merupakan *effect of political importance*, yang meliputi kebutuhan akan keyakinan politik dan *effect of biases cycles*, yang lahir sebagai bentuk perenungan komprehensif terhadap “kekecewaan” atau bias situasi sosial; suatu kegelisahan untuk menemukan suatu kepercayaan yang mampu mereduksi bias sosial tersebut.⁴⁰

Ketika rangsangan-rangsangan itu terjadi, maka akan timbul pemikiran kreatif tentang politik. Proses tersebut bertahap, dimulai dari; 1) *dissociating fact and desires*, 2) *recognizing differences*, 3) *knowing institutional*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48. Lengkapnya lihat VO. Key and Agrazia Alfred D., *The Elements of Political Scient* (New York: Alfred Knopf, 1952), hlm. 9

obstacles, 4) calculated risk, 5) devising political strategic dan 6) continual revision goals. Pada tahap ketiga sampai terakhir, proses kreatif diletakkan pada tujuan pragmatis untuk merespon peristiwa politik langsung. Sedangkan tahap pertama dan kedua, proses kreatif ditujukan untuk merespon peristiwa politik tidak langsung.⁴¹

Dari penjelasan ini, pemikiran politik pada dasarnya bukanlah sebagai produk pragmatis, tetapi juga pemikiran yang bersifat bestari. Robert E. Lane secara khusus menjelaskan bahwa alasan yang kuat kenapa seseorang dapat melahirkan pemikiran politik itu karena terkait dengan (selalu) hadirnya peristiwa politik dalam kesadaran manusia.⁴² Lebih jauh lagi, Lane mengatakan preferensi sosial yang berada di sekitar manusia dan kesadaran partikularnya menjadi faktor kuat bagi lahirnya pemikiran-pemikiran politik.⁴³

Ada tiga pendekatan yang lazim digunakan ketika berbicara soal politik, *pertama*, pendekatan normatif berorientasi pada tingkat nilai: nilai sebagai dasar perilaku, dan menekankan prinsip-prinsip ideal dalam sistem. *Kedua*, pendekatan perilaku menekankan pada elemen-elemen keseharian dari politik: politisi, kejadian politik; berusaha menemukan tipe, karakter, dan dampak dari sebuah keputusan politik. *Ketiga*, pendekatan struktural, menekankan pada analisis struktur, baik hukum, sejarah maupun sosial.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 46-47.

⁴² Robert E. Lane, *Political Man* (New York: The Free Press, 1972), hlm. 63.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 84-99.

⁴⁴ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur*, hlm. 49.

Ada hal menarik dari studi yang sudah banyak dilakukan, yakni adanya perbedaan signifikan dalam menentukan pilihan-pilihan politik berdasarkan kecenderungan teologis yang dianutnya. Ada di antara kiai yang lebih lentur dan sangat mudah berubah, sehingga politik terkesan menjadi ”semacam” bentuk permainan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis yang senantiasa berubah dan berkembang.

Sementara sebagian lainnya, ada kiai yang terkesan kaku, atau mungkin juga bisa disebut konsisten dengan pendirian awalnya, sehingga tampak menempatkan politik dalam kerangka persoalan prinsip. Adanya perbedaan perilaku politik kiai, dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor. *Pertama*, faktor posisi sosial kiai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi, menunjukkan kekuatan kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.⁴⁵

Sementara, Geertz menunjukkan kiai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*), penghubung dan juga penyaringb budaya antara pesantren dengan “dunia luar”.⁴⁶ Meskipun secara politis kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak memiliki pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan. *Kedua*, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis sebagai dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang sering kali diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik, kiai

⁴⁵ Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, hlm. 54-60.

⁴⁶ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Proyayi*, hlm. 21-22.

dipandang memiliki kemampuan "luar biasa" untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik.

Kiai bukanlah politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap "fatwa" politik yang terakhir untuk diikuti. Kasus KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena "nasehat-nasehat" kiai yang mendorong untuk mengambil keputusan seperti itu.

Perubahan perilaku politik dari yang semula berorientasi teologis revivalis-fundamentalis menjadi progresif adalah wujud penyesuaian dengan sistem politik yang berkembang. Hal itu karena partai-partai politik Islam atau Islam itu sendiri tidak memiliki potensi negatif bagi relasinya dengan demokrasi maupun politik bernegara. Dengan demikian, moderatisme, fleksibelisme, dan akomodasionisme merupakan pilar penting partai politik Islam di masa depan untuk memberikan kontribusi bagi demokratisasi dan penanaman nilai-nilai *civil society* di Indonesia.⁴⁷

Marzuki Wahid mengemukakan bahwa motivasi keikutsertaannya para kiai masuk ke ranah politik mencerminkan kemerdekaan dunia pesantren. Dunia pesantren tidak monolitik dan seragam. Ragam-ragam pesantren sering kali dipicu oleh "*the interest of gressroot*", kebutuhan masyarakat sekitar.⁴⁸ Berbeda Martin van Bruinessen yang melihat bahwa kemunculan kiai NU

⁴⁷ Saiful Mujani, "*Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia*," Disertasi di Ohio State University 2003

⁴⁸ Marzuki Wahid, "The Methamorphosis of Pesantren: Struggling With Pesantren Traditional, Local Culture, and Political Interest of Kiai, *International Journal of Pesantren studies*, Vol. 2, No. 1 (2008), hlm. 52.

sebagai buah dari doktrin Sunni yang diyakininya.⁴⁹ Tetapi bagi Hisanori Kato, kemunculan kiai NU merupakan reaksi dari tumbuhnya modernisme.⁵⁰

Sementara, Yudian Wahyudi menyebut kemunculan kiai NU merupakan implementasi dari *maqasid syari'ah* (tujuan syari'ah), yaitu suatu pemikiran yang mendialektikkan teks illahiah (*nash*) dengan konteks kekinian (*'urf*), termasuk dalam pemikiran politik. Proses yang demikian itu, menurut Yudian termasuk dalam kategori ijtihad, yakni melakukan konstruksi logika ushul fiqh ketika memutuskan suatu keyakinan politik.⁵¹

Dalam konteks yang sama, Djohan Effendi, dengan menyitir pendapat Masdar F. Mas'udi, orientasi fiqh syiasah didasarkan pada empat prinsip *al-shura* (musyawarah), *al-adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), dan *al-musawah* (kesetaraan). Djohan juga mengutip pandangan KH. Muchit Muzadi yang menjelaskan relasi antara fiqh politik dan model-model ijtihad NU bahwa "*ijtihad and mazhab is like a game and the rule of the game.*"⁵²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁹ Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 51.

⁵⁰ Hisanori Kato, *Agama dan Peradaban*, terj. Ismu. M. Gunawan (Jakarta: Dian Rakyat, 2002), hlm. 105-106.

⁵¹ Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawesewa Press, 2006), hlm. 20-38.

⁵² Djohan Effendi, *A Renewal Without Breaking Tradition, The Emergence of a New Discourse in Indonesia's Nahdlatul Ulama During The Abdurragman Wahid Era*, (Yogyakarta: Interfidei, 2008), hlm. 116 dan 158-159.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif⁵³ yang memfokuskan pada penggunaan berbagai macam data kepustakaan (*library research*) atau data-data tertulis, baik sebagai data primer maupun data sekunder yang meliputi buku, jurnal, majalah, naskah, catatan sejarah, dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya.⁵⁴ Tentu saja sumber atau data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang berkaitan dengan kiprah Kiai Bisri Syansuri di pentas politik nasional.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*). Lebih khusus lagi, penelitian ini, merujuk pandangan Garraghan,⁵⁵ ingin mencoba menelusuri data-data sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Artinya, pembacaan atas sejarah dalam penelitian ini tidak hanya menceritakan suatu kejadian (*naratif*), melainkan juga melakukan analisis secara kritis dan mendalam mengenai faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual

⁵³ Jika diuraikan lebih sederhana penelitian ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan “mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*)” secara deskriptif atas data-data tertulis atau pemikiran yang menjadi obyek kajian. Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 2-7.

⁵⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 135.

⁵⁵ Gilbert J. Garraghan, S.J., *A Guide Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33.

serta unsur-unsur yang menjadi komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.⁵⁶

Berkenaan dengan ketokohan Kiai Bisri Syansuri, pada dasarnya penelitian ini juga bersifat biografis. Namun, karena titik tekannya lebih kepada kiprah dan gagasan politiknya, maka pendekatan sejarah yang dimaksud adalah sejarah pemikiran. Dalam konteks ini, penulis merujuk pandangan Kuntowijoyo,⁵⁷ yang memberikan batasan tentang sejarah pemikiran, di mana penulis akan: 1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah, 2) membicarakan konteks sejarahnya, 3) pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik atas sumber, kemudian diinterpretasi yang selanjutnya diperoleh fakta-fakta sejarah. Dari fakta-fakta inilah kemudian diadakan perangkaian atas fakta satu dengan fakta lainnya yang didukung dengan data-data yang kuat sehingga menghasilkan cerita sejarah.⁵⁸

3. Analisis Data

Metode analisis data penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Penulis mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan praktik politik Kiai Bisri Syansuri. Setelah itu, penulis membuat

⁵⁶ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 2. Model penelitian sejarah ini biasa juga disebut dengan *reductionalist approach*, yakni seorang peneliti berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan penuh keraguan. Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan Tazzafa, 2004), hlm. 155-156.

⁵⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 191.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 94-103.

rumusan-rumusan sebagai kecenderungan fiqh siyasah Kiai Bisri. Penelitian ini juga bersifat komparatif. Sejauh hal itu dibutuhkan, penulis akan melakukan perbandingan pemikiran Kiai Bisri dengan *counter discourse*-nya.⁵⁹

Sebagai *tool of analysis* data, penulis akan menggunakan teori diskursus. Karena itu, analisis penelitian ini tidak hanya menempatkan pemikiran Kiai Bisri Syansuri sebagai pemikiran individual (*fikr rajulin*), tetapi sebagai fenomena pemikiran (*zahirah fikriyyah*).⁶⁰ Artinya, sejarah pemikiran dalam penelitian ini bukan semata diartikan sebagai sejarah ide atau tentang historisitas sebuah ide yang kronologis, tapi juga sebagai bangunan epistemologi keseluruhan dinamika pemikiran NU.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini dibagi dalam lima bab. Bab *pertama* membahas latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, penelitian yang relevan, dan metodologi penelitian. Bab *kedua* membahas tentang konstruksi pemikiran fiqh siyasah NU. Di dalamnya dibahas tentang basis kosmologi politik NU yang berpangkal pada ideologi dan tradisi. Kemudian reposisi fiqh siyasah sebagai model pendekatan baru dan pemaknaan realitas sosial-politik. Dikupas pula tentang karakteristik ijtihad politik NU dan revitalisasi peran politik kiai NU.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 191-195.

⁶⁰ Terkait dengan pendekatan semacam ini, uraian lengkapnya lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Turath wa al-Hadathah, Dirasat wa Munaqashat, al-Tab'ah al-Thaniyah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, 1999), hlm. 168-169.

Bab *ketiga* mengkaji biografi Kiai Bisri Syansuri. Penulisan biografi ini dimulai dari ia lahir di tengah tradisi keagamaan yang kuat. Kemudian masa belajar sebagai santri yang sangat konsisten menekuni ilmu fiqh. Dibahas pula ketika Kiai Bisri menjadikan Pesantren Denanyar, Jombang sebagai pusat kesetaraan sosial. Selain menjadi guru di pesantren, ia juga menjadi aktivis NU hingga menjadi politisi untuk berjuang demi bangsa dan negara.

Bab *keempat* analisis ijtihad politik Kiai Bisri Syansuri di bawah tekanan rezim Orde Baru (1970-1980). Di dalamnya mengkaji hubungan politik Islam dan Orde Baru yang dipenuhi kecurigaan. Kemudian, sikap oposisional NU dan fatwa politik sebagai bentuk wacana perlawanan. Mengkaji pula tentang radikalisme politik Kiai Bisri ketika berhadapan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Orde Baru.

Bab *kelima* penutup. Di dalamnya berisi kesimpulan sebagai jawaban atas persoalan yang dikaji, sekaligus rekomendasi yang ditujukan kepada peneliti berikutnya, yang akan melakukan penelitian terkait dengan tema ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa fiqh Kiai Bisri Syansuri bukanlah fiqh siyasah yang dimainkan secara instrumental, tetapi diorientasikan secara praksis dan melebur dalam praktik berpolitik. Bukan pula fiqh sebagai alat legitimasi praktik politik penguasa Orde Baru, melainkan sebagai strategi dalam berpolitik. Maka dari itu, fiqh siyasah Kiai Bisri tidak terbatas pada teks. Ada interaksi yang intens antara logika teks dan konteks sosial politik, sehingga mendinamisasi fiqh NU dalam bersiyasah.

Hal itu terlihat dari fatwa-fatwa atau keputusan politik yang dikeluarkan Kiai Bisri, di mana fiqh menjadi wacana tandingan (*counter discourse*), atau bahkan wacana perlawanan (*resistance discourse*) terhadap kooptasi dan depolitisasi politik Islam yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Wacana tandingan atau perlawanan itu diorientasikan untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dalam kerangka menjaga keseimbangan kekuasaan Orde Baru dan melakukan mekanisme kontrol yang efektif dan konsisten dalam menjalankan pemerintahan.

Perlu diketahui pula bahwa cara berfiqh (*tafaqquh*) Kiai Bisri yang cenderung radikal ini lebih disebabkan oleh kondisi sosial-politik yang ada. Radikalisme politik Kiai Bisri karena tradisionalisme kegamaannya yang terkadang menghasilkan jalan kompromi sehingga terkesan inkonsisten.

Radikalisme yang kemudian berkompromi dengan pemerintah Orde Baru ini menurut sebagian pengamat dikatakan sebagai bentuk narsisme politik NU karena untuk menjaga mayoritas.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa narsisme politik ke-egoan NU tidak ditunjukkan dalam soal jumlah, seperti politik pasca reformasi saat ini, tetapi lebih kepada kualitas untuk memperjuangkan ide-ide, gagasan, pembaruan, *tadjud* dan etika kebangsaan. Sebab, NU mengalami peminggiran dan dislokasi akibat politik represif Orde Baru.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian ihwal praktik politik Kiai Bisri Syansuri khususnya dan NU pada umumnya, di masa Orde Baru (1971-1980) harus diakui bahwa karya ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dalam konteks kajian fiqh siyasah, penting untuk dikaji lebih lanjut tentang cara berfiqh Kiai Bisri Syansuri di masa Demokrasi Terpimpin yang terkesan akomodasionis terhadap Soekarno. Hal ini penting untuk memberikan penjelasan terhadap pola berfiqh Kiai Bisri baik di masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan. *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ahmad, Munawar. *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Alfian. *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*. terj. Machnun Husein. Jakarta: Al-Wasat, 2010.
- Ali, As'ad Said. *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Ali, Moh. Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amak FZ. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
- Ambardi, Kuskrido. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem kepartaian di Indonesia era Reformasi*. Jakarta: KPG, 2009.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. cet. I. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Anshori, Ahmad Yani. *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Aritonang, Jan S. *Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Athoillah, Ahmad dkk. *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqh, Lentur Bersikap*. Surabaya: Idea Pustaka, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama. Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1988.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri. *Ijtihad dalam Sorotan*. cet. IV. Bandung: Mizan, 1991.
- Bakry, Hasbullah. *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Baso, Ahmad. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.

- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- _____. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: Gading, 2013.
- Dharwis, Ellyasa. *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. cet. III. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- _____. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Feillard, Andree. *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana. cet. III. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa*. terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya. 1981.
- Ghofir, Jamal. *Biografi Singkat Ulama Ahlusunnah Wal Jama'ah Pendiri dan Penggerak NU*. Yogyakarta: GP Ansor Tuban, 2012.
- Gilbert J. Garraghan, S.J. *A Guide Historical Method*. New York: Fordham University Press, 1957.
- Greg Barton dan Greg Fealy, (ed.). *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. terj. Ahmad Suaedy, dkk. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Hammond, J.L. *The Politics of Benevolence: Revival Religion and American Voting Behaviour*. Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1979.

- Hasan, Mohammad Kamal. *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*. terj. Ahmadi Thoha. Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1987.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI, 2001.
- Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Innayatullah, Benny. *Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan*. Jakarta: Laporan Tahunan The Indonesia Institute, 2008.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jabiri, Muhammad Abid al-. *al-Turath wa al-Hadathah, Dirasat wa Munaqashat, al-Tab'ah al-Thaniyah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, 1999.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Bila Kiai Dipertuhankan : Membedah Sikap Keberagamaan NU*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kato, Hisanori. *Agama dan Peradaban*. terj. Ismu. M. Gunawan. Jakarta: Dian Rakyat, 2002.
- Konstituante Republik Indonesia. *Risalah Perundingan Tahun 1957, Djilid VI, Sidang III Rapat ke-65 sampai ke-71*. Bandung: Masa Baru, 1957.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- _____ *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- _____ *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. cet. VIII. Bandung: Mizan, 1998.
- _____ *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1999.
- Lane, Robert E. *Political Man*. New York: The Free Press, 1972.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Lembaga-lembaga Hukum*. terj. H. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986.

- Liddle, R.W. *Partisipasi dan Praktek Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru*. Jakarta: Grafiti, 1992.
- Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. terj. Nugroho Notokusanto. Jakarta: UI Press, 1985.
- Lueey, William Leo. *History: Method and Interpretation*. Chicago: Layola University Press, 1958.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. "Aliran Politik di Tubuh Orde Baru," dalam *Gerbang*, edisi pertama, Th. I (Desember 1998- Februari 1999).
- _____. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- _____. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Gama Insani Press, 1996.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat al-Islami di Pakistan*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahfudz, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Masudi Masdar F. (ed). *Fiqh Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat*. t.tp: P3M, RMI, Pesantren Cipasung, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mun'im DZ, Abdul. *Kaidah Berpolitik & Bernegara KH Abdul Wahab Chasbullah*. cet. II. Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2015.
- Muzani, Saiful (ed). *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Niel, Robert van. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. terj. Zahara Deliar Noer. cet. II. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.

- _____. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. cet. VIII. Jakarta: LP3ES, 1996.
- _____. *Islam dan Politik*. Jakarta: Yayasan Risalah. 2003.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Piscatori, James P. (ed.). *Islam in the Political Process*. New York: Cambridge University Press, 1983.
- Qodir, Zuly. *Islam Syariah vis-à-vis Negara, Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Raharjo, M. Dawan. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa : Risalah Cendaiawan Muslim*. Bandung : Mizan, 1993.
- Rahman, Jamal D. *Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun KH. Ali Yafie*. Bandung: Mizan, 1997.
- Ramage, Dougkas E. *Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideologue of Tolerancy*. London: Routledge, 1995.
- Ricklefs, Merle C. *Religious Reform and Polarization in Java*. Leiden: ISIM, 2008.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Saifuddin, Lukman Hakim (ed.). *Fahmi D. Saifuddin Dokter NU Itu*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2002.
- Sairin, Weinata dan J.M. Pattinasina (ed.). *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia, 1994.
- Santoso, Priyo B. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respon Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. cet. I. Bandung: Mizan, 1998.
- Siddiq, KH. Achmad. *Khittah Nahdliyyah*. cet. IV. Surabaya: Khalista, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Teori, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. cet. V. Jakarta: UI Press, 2008.

- Sudrajat, Ajat. *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan dan Joenaedi Efendi. *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama; Sketsa Politik Kiai & Perlawanan Kaum Muda NU*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Ulum, Amirul dkk. *The Founding Fathers of Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Bina Aswaja, 2014.
- Ulum, Bahrul. *Bodohnya NU apa NU Dibodohi, Jejak Langkah NU di Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Ummatin, Khoiru. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- _____ KH. Bisri Syansuri *Pecinta Hukum Fiqh Sepanjang Hayat*. Jakarta: Amanah, 1989.
- _____ *Kyai Nyentrik Membela Pemerintah*, cet. IV, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Wahyudi, Yudian. *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2006.
- Yafie, KH. Ali. *Jati Diri Tempaan Fiqih*. Jakarta: FKMPASS, 2001.
- _____ *Mengupas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zahrah, Abu. *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*. jilid II. t.t: Dar al-Fikr al-'Arabi: t.th.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zuhri, Saifuddin *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- _____ *Mbah Wahab Chasbullah Kiai Nasionalis Pendiri NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- _____ *Unsur Politik dalam Dakwah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1982.

CURRICULUM VITAE

Data Diri :

Nama : JOKO WAHYONO
Tanggal Lahir : Sragen, 14 Juli 1986
Agama : Islam
Tinggi/ Berat Badan : 173 cm / 63 kg
Status : Menikah
Alamat : Jl. Timoho, Gendeng GK IV/943, Baciro, Gondokusuman,
Yogyakarta 55225
Hp : 085-729-160563
Email : djowhy@yahoo.co.id

Pendidikan :

2011 : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2005 – 2009 : S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2001 – 2004 : SMK "Sakti" Gemolong, Sragen
1998 – 2001 : MTs N Model, Sumberlawang, Sragen
1992 – 1998 : SD N Mojopuro I Sumberlawang, Sragen

Pekerjaan :

2015 – Sekarang : Peneliti di LPTI Pelataran Mataram Yogyakarta
2012 – Sekarang : Redaktur Majalah Bangkit PWNU DIY